

PK 2

 PERPUSTAKAAN	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN YOGYAKARTA
Diterima	25 MAR 2009
Inventarisasi	: 4081/FH/HO.3/2009.
Klasifikasi	: 345 EDW 08
Subyek	: Criminal law - corruption

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN
PEMBUKTIAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

EDWARD ANGGA, ONGIRWALU

NPM : 04 05 08817
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008**

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN
PEMBUKTIAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Disusun oleh :

EDWARD ANGGA, ONGIRWALU

NPM : 04 05 08817
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**Fakultas Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008**

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIFITAS PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan oleh :

EDWARD ANGGA, ONGIRWALU

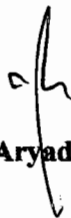
NPM : 04 05 08817

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 22 Desember 2008**

Dosen Pembimbing



G. Aryadi., S.H, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

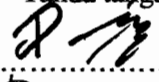
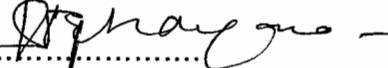
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

H a r i : Sabtu
Tanggal : 10 Januari 2009
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji,

Ketua : Dr. Drs. Paul Soge., SH., M.Hum.
Sekretaris : Ch. Meidy Suharyono., SH., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi., S.H, M.Hum.

Tanda tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


.....
(B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.)

MOTTO

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hal esok hari karena esok hari itu ada kuatirnya sendiri. Cukuplah tiap-tiap hari ada dengan kesusahannya sendiri.

(Matius 6 : 34)

&

Serviam

(Saya Siap Melayani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan bagi :

1. Yesus Kristus serta seluruh keluarga Allah;
2. Kerja keras Papa yang tak pernah berhenti dan doa Mama yang tak akan putus;
3. Kristiani Septiandari, cahaya kecil di sangkar keabadian;
4. Semua Keturunan Ongirwalu;
5. dan semua saudara dalam pergaulanku di Malang (Agung, Ardi, Chriesta, Eddy, Indra, Meo, Raymond, Risky, Reza, dan Yan).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, atas berkat, penyertaan dan kasihnya yang tidak pernah berhenti selama penulis menyusun dan akhirnya menyelesaikan Sripsi ini yang berjudul: “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Pembagian Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi”. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi., S.H., M.HUM., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan, dukungan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Asep Saeful Bahari selaku Kepala Seksi Sosial Politik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bapak Bambang Suprianto selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kotamadya Yogyakarta.
5. Papa dan Mama yang selalu menghadirkan semangat, doa, dukungan, serta pencerahan pada saat penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga Pankratius Batfutu yang tak henti mendukung secara materi dan doa.
7. Keluarga besar di Jogja yang telah sedia saya tumpangi, terutama Keluarga Om Pri, Royan dan Aan yang selalu menghibur saya lewat perkelahian mereka saat saya sibuk menyusun tulisan ini.

8. Bapak Kamisran sekeluarga yang telah memberikan banyak kemudahan saat skripsi ini disusun.
9. Semua teman yang telah mendukung, anak-anak Twister, rechter 2004, teman2 KKN, serta teman-teman main di rumah yang telah banyak membantu melalui segala motivasi yang diberikan.
10. Doni, Wahyu, Nanang, dan Condol yang telah membantu demi kelancaran penyelesaian penulisan hukum ini.
11. Semua pihak yang terkait dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, sehingga penulisan Hukum / Skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum / skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Penulis,

Edward Angga, Ongirwalu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	15
H. Metode Analisis	18
I. Kerangka Isi Penulisan Hukum	19

BAB II. PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA	
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	22
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	22
B. Tinjauan tentang Undang-Undang Korupsi dan Sejarah Perkembangannya	31
C. Tinjauan tentang Pembuktian Terbalik yang Bersifat Terbatas dan Berimbang	47
D. Tinjauan tentang Kejaksaan	49
E. Pembahasan tentang Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi ..	66
BAB III. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Abstract

This legal writing entitled The effectiveness of Implementing the Distribution of Verification Burden for Public Prosecutor in Judicature of Corruption Criminal Act. This legal writing discussed the problems concerning on the effectiveness emerged by verifying system by the shape of providing verification burden or reversed verification that has limited characteristic and equal used by judicature of corruption criminal act to the prosecutor's performance. Corruption criminal act is a extraordinary crime that became other object in this legal research in addition of prosecutor, by the reason of this criminal act is criminal action that threaten state budget as public money and it is also a violation to human rights, i.e. retaking the public/communal rights and can disturb the fluentness of national development. This legal writing was normative juridical research and as consequence data collection it was conducted by literary study method and interview to the source persons relating to the problem understudied. The data from books and other literatures will be used as secondary legal sources. This legal writing was conducted to finding out how extent to the role of prosecutor or judiciary as an institution that has authority to conduct investigation and suing tow the criminal act of corruption. The result of this literary study and interview to source persons, it gained conclusion that the implementation of verification burden distributing system in judicature of corruption criminal act doesn't not have big effects to the prosecutor's performance as the investigator or public prosecutor. It is caused by former before this verification system is ruled in the Republic of Indonesian Laws Number 20 of 2001 on Eliminating of Corruption Criminal Act as the newest laws on corruption; verification has been used in judicature process of real corruption criminal act.

Keyword : Public Prosecutor, Distribution of Verification Burden, Corruption Criminal Act

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2008

Yang menyatakan,

Edward Angga, Ongirwalu.